



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Februari 2018/Periodik - 2017)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI
UNIT KERJA : HAKIM KONSTITUSI
SUB UNIT KERJA : HAKIM KONSTITUSI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **Wahiduddin Adams**
2. Jabatan : **HAKIM KONSTITUSI**
3. NHK : **108089**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 3.090.500.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 161 m²/100 m² di Kota Tangerang, HASIL SENDIRI Rp. 740.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 216 m²/150 m² di Kota Tangerang, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 136 m²/57 m² di Kota Tangerang, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
4. Tanah Seluas 8925 m² di Kab. Ogan Komering Ilir, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
5. Tanah Seluas 5704 m² di Kab. Ogan Komering Ilir, HASIL SENDIRI Rp. 45.500.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m²/100 m² di Kota Tangerang, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
7. Tanah Seluas 352.5 m² di Kab. Ogan Komering Ilir, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 335.000.000**

1. MOBIL, Toyota Fortuner 2.5 G A/T Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000
2. MOBIL, Toyota Vios 1.5 Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 73.109.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. 1.000.000.000**



E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	5.170.066.998
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	9.668.675.998
III. HUTANG	Rp.	46.668.985
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	9.622.007.013

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **7 Juni 2018**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.